

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian berbagai negara memiliki kunci yang sama untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yaitu lewat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jumlah dan kontribusi UMKM terhadap lapangan kerja telah terdokumentasikan dengan baik dan para pembuat kebijakan sepakat bahwa usaha-usaha ini penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Keberadaan UMKM merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi perekonomian (Simanjuntak, 2020). Kontribusi yang signifikan ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. UMKM dapat menjadi prioritas atau pilar sistem perekonomian kerakyatan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selain itu, UMKM memiliki peranan dalam penyaluran hasil pembangunan.

Tabel 1. 1 Data UMKM 2018-2024

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah UMKM (Juta)	64,19	65,47	64	65,46	65	66	65,20
Pertumbuhan (%)	2,02%	1,98%	-2,24%	2,28%	-0,70%	1,52%	-1,21%

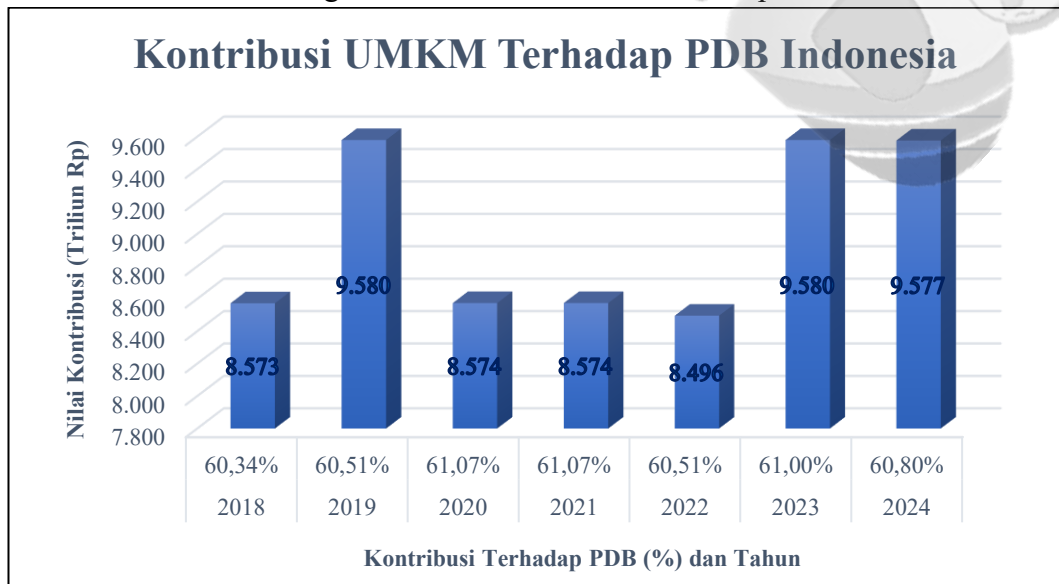
Sumber: Kadin.id, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa UMKM beberapa tahun terakhir menggambarkan perubahan yang fluktuatif, mulai dari tahun 2018 dengan total keseluruhan sebesar 64,19 juta, diikuti oleh kenaikan UMKM tahun 2019 yang mencapai 65,47 juta usaha. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah UMKM menjadi 64 juta, dengan kenaikan pada tahun berikutnya menjadi 65,46 juta usaha. Jumlahnya kembali turun pada 2022 menjadi 65 juta. Terakhir, data pada

tahun 2023 mencatat pertumbuhan UMKM yang signifikan sebesar 1,52% dari total kenaikan jumlah UMKM yang mencapai 66 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, untuk tahun 2024, jumlah UMKM diperkirakan mencapai 65,20 juta unit berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM yang menyebutkan jumlah UMKM lebih dari 65 juta. Angka ini menunjukkan adanya sedikit penurunan sekitar -1,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini diduga disebabkan oleh berbagai tantangan pascapandemi seperti daya beli masyarakat, ketatnya persaingan pasar digital, serta masih terbatasnya literasi teknologi pada sebagian pelaku UMKM. Kenaikan dan penurunan jumlah UMKM ini sangat berpengaruh terhadap kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahunnya, sebagaimana akan disajikan pada diagram sebagai berikut.

Gambar 1. 1 Diagram Kontribusi UMKM Terhadap PDB Indonesia



Sumber: DJPb.Kemenkeu, 2025

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama enam tahun terakhir, dari tahun 2018 hingga 2023. Secara umum, kontribusi UMKM menunjukkan kecenderungan

yang stabil dengan fluktuasi kecil dalam persentase, namun tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap PDB tercatat sebesar 60,34% dengan nilai kontribusi sekitar Rp8.573 triliun. Tahun berikutnya, yaitu 2019, terjadi sedikit peningkatan menjadi 60,51%, dan nilai kontribusinya meningkat menjadi Rp9.580 triliun, mencerminkan pertumbuhan aktivitas UMKM yang cukup signifikan saat itu. Masuk ke tahun 2020 dan 2021, meskipun persentasenya naik dari 60,51% ke 61,07%, nilai nominal kontribusi UMKM terhadap PDB justru turun drastis sekitar Rp 1.006 triliun pada tahun 2020, akibat dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Tahun 2021 pun belum menunjukkan pemulihan dari segi nominal, masih stagnan di angka Rp 8.574 triliun. Pada tahun 2022, persentase kontribusi UMKM mengalami penurunan menjadi 60,51% dengan nilai kontribusi yang juga mengalami penurunan menjadi Rp 8.496 triliun.

Namun puncaknya terjadi pada tahun 2023, di mana kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61%, yang secara nominal setara dengan Rp9.580 triliun. Kontribusi UMKM pada tahun ini juga telah menyerap sekitar 117 juta pekerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Memasuki pada tahun 2024, kontribusi UMKM terhadap PDB diperkirakan sedikit menurun menjadi 60,80%, dengan nilai kontribusi mencapai Rp9.557 triliun. Meskipun terjadi sedikit penurunan dalam persentase, angka tersebut tetap mencerminkan peran penting UMKM dalam menopang perekonomian nasional secara berkelanjutan.

Semua angka ini menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan UMKM yang signifikan pasca-pandemi, sekaligus menandai UMKM mempunyai peranan penting sebagai sektor usaha dalam peningkatan ekonomi Indonesia (Kadin.id,

2025). Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa sektor UMKM terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi konsisten lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan nilai nominal yang terus meningkat, UMKM berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Tidak hanya meningkatkan pendapatan ekonomi negara, wilayah provinsi juga terbantu atas kontribusi UMKM dalam peningkatan ekonomi masyarakat salah satunya Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan berbagai program untuk mendukung UMKM, termasuk pembinaan, pengembangan, pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan fasilitasi akses pasar. Kegiatan yang dilakukan Pemprov Sumsel ini mencakup Sriwijaya Expo, Festival Sriwijaya, pameran Expo Pemprov Sumsel dengan diadakannya kegiatan ini UMKM dapat meningkatkan mutu produk UMKM menjadi unggulan. Salah satu produk UMKM unggulan Sumsel yaitu songket yang merupakan salah satu dari jenis tekstil tradisional yang mendapatkan prioritas pengembangan lima sektor manufaktur dari Menteri Perindustrian. Produksi songket telah menarik 121 UMKM di pusat budaya Sumatera Selatan yakni Kota Palembang. Ini menunjukkan bahwa peran UMKM Kota Palembang dalam peningkatan perekonomian Indonesia sangat besar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, tahun 2023 terdapat 80.627 UMKM yang terdaftar, sementara jumlah yang diprediksi sekitar 160 ribu UMKM.

Di sisi lainnya, Berdasarkan data perkembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Kota Palembang dengan angka tingkat UKM tertinggi sebesar 220.301. Khususnya pertumbuhan industri fashion

sepanjang tahun 2022 mencapai 9,34 persen, mengindikasikan potensi besar bagi industri songket Palembang. Kontribusi UMKM lokal yang memproduksi produk unggulan songket sangat mempengaruhi peningkatan ekonomi di Kota Palembang dari UMKM industri lainnya. Tidak hanya ditingkat kota melainkan ditingkat kecamatan juga bahwasanya UMKM memiliki peranan yang besar terhadap peningkatan masyarakat ini terjadi karena UMKM berfungsi sebagai entitas produsen dan konsumen yang signifikan, sehingga perputaran uang ekonomi di masyarakat dipengaruhi oleh aktivitas UMKM itu sendiri. UMKM menunjukkan ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi krisis ekonomi moneter (Hamzah & Agustien, 2019). Kota Palembang terbagi menjadi 2 wilayah yang terdapat 18 kecamatan. Salah satu wilayah kota Palembang adalah Seberang Ulu dengan 4 kecamatan yang merupakan kawasan sentral kuliner Kota Palembang. Berikut adalah tabel jumlah UMKM di wilayah Seberang Ulu.

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM di Seberang Ulu

No	Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah
1.	Seberang Ulu I	4.650	0	0	4.650
2.	Seberang Ulu II	5.265	15	6	5.286
3.	Plaju	5.426	8	1	5.435
4.	Kertapati	5.680	1	0	5.681
Jumlah		21.021	24	7	21.052

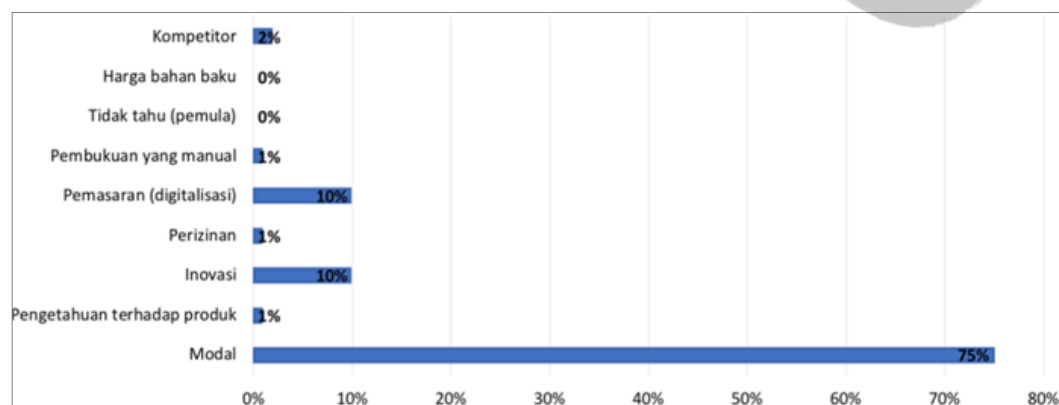
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, 2025

Dari table 1.2 dapat dilihat bahwa pesebaran UMKM dari total keseluruhan jumlah UMKM di Seberang Ulu yaitu 21.052 unit. Usaha mikro mendominasi jumlah usaha tertinggi dari usaha kecil dan usaha menengah yaitu ada di Kecamatan Kertapati dengan total usaha kecil 5.680 unit sedangkan usaha mikro terendah ada di Kecamatan Seberang Ulu I dengan total usaha 4.650. Selanjutnya usaha kecil

tertinggi ada di Kecamatan Seberang Ulu II dengan total usaha 15 unit sedangkan usaha kecil terendah ada di Seberang Ulu I dengan total usaha 0 unit. Terakhir usaha menengah tertinggi ada di Seberang Ulu II dengan total usaha 6 unit sedangkan usaha menengah terendah ada di Seberang Ulu I dan Kertapati dengan total usaha 0 unit. Meskipun Kota Palembang mengalami peningkatan jumlah UMKM yang tersebar merata di seluruh wilayah dan kecamatan, tetapi bisa dilihat dari jumlah UMKM wilayah Seberang Ulu yang di beberapa kecamatannya jenis UMKM masih belum seimbang dan hanya mendominasi jenis usaha mikro saja.

Hal ini dapat dikatakan bahwa UMKM di Seberang Ulu masih memiliki kendala terkait akses permodalan, akses pembiayaan, dan akses pasar. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya pengetahuan tentang fintech dan ketidakpercayaan terhadap aplikasi perbankan fintech yang dimiliki pelaku UMKM (Rumondang, A et al., 2019). Berikut diagram presentase dari tantangan-tantangan yang dihadapi para UMKM di Kota Palembang termasuk wilayah Seberang Ulu.

Gambar 1. 2 Diagram kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM



Sumber: Laporan Akhir UMKM Palembang 2023

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa para pelaku UMKM di Kota Palembang termasuk wilayah Seberang Ulu menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan usahanya. Dari 100 responden pada data diagram diatas, sebanyak

75% menyatakan kendala yang dihadapi ialah berkaitan dengan modal, lalu sebanyak 10% menyatakan bahwa inovasi dalam menjalankan usaha merupakan kendala yang dihadapi oleh para pelaku, sebanyak 10% juga menyatakan bahwa permasalahan terkait pemasaran menjadi kendala yang dihadapi oleh para pelaku, sisanya 5% merupakan kendala-kendala yang berkaitan dengan pengetahuan terdapat produk, perizinan, pembukuan yang manual, ketidaktahuan para pelaku, serta harga bahan baku. Dapat disimpulkan bahwa kendala terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM di wilayah ini adalah keterbatasan modal usaha.

Modal merupakan aspek fundamental dalam menjalankan dan mengembangkan usaha, mulai dari pembelian bahan baku, pengadaan alat produksi, hingga ekspansi pasar. Namun, akses terhadap sumber pembiayaan konvensional seperti perbankan masih menjadi tantangan, terutama karena keterbatasan jaminan, rendahnya literasi keuangan, dan minimnya pencatatan keuangan yang rapi. Dalam konteks inilah, adopsi teknologi finansial (fintech) menjadi solusi yang relevan. Di Indonesia, pertumbuhan fintech menunjukkan tren positif yang sangat efektif. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat pada tahun 2023 lebih dari 300 perusahaan yang beroperasi pada bidang fintech di berbagai kategori layanan mulai dari pembayaran, pinjaman, hingga manajemen keuangan yang tersebar di Indonesia. Salah satu bentuk fintech yang paling potensial untuk menjawab masalah modal adalah *Peer-to-Peer (P2P) Lending*.

P2P Lending memungkinkan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan secara digital langsung dari investor tanpa melalui lembaga keuangan formal. Proses yang mudah, tanpa jaminan fisik, serta pencairan yang cepat menjadi daya

tarik utama layanan ini. Beberapa contoh platform yang telah menjangkau pelaku UMKM di Indonesia antara lain Investree, KoinWorks, dan Amarnya, yang menawarkan model pembiayaan sesuai kebutuhan UMKM, baik untuk modal kerja, pembelian stok, maupun digitalisasi usaha. Peran perusahaan Fintech P2P Lending terbukti dapat menjadi alternatif solusi peminjaman modal yang mudah, cepat, aman bagi UMKM (Mukhtar & Rahayu, 2019).

Selain pembiayaan, aspek lain yang berkontribusi terhadap keberhasilan UMKM adalah kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Fintech payment seperti dompet digital, QRIS, dan sistem pembayaran terintegrasi membantu UMKM mengelola arus kas, mempercepat transaksi, dan memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pembayaran. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bertransaksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan penjualan dan efisiensi usaha. Sistem pembayaran digital, dompet elektronik (e-wallet), dan layanan transfer uang yang ditawarkan oleh fintech telah menciptakan kemudahan transaksi pembayaran bagi pelaku UMKM (Suganda, U. K., & Arrifianti, 2023). Kemudahan transaksi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan biaya transaksi, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan UMKM (Latifah & Waluya Jati, 2023).

Pemanfaatan fintech, baik dalam bentuk P2P Lending maupun kemudahan transaksi pembayaran, tidak hanya berperan dalam menyediakan akses modal dan efisiensi pembayaran, tetapi juga menjadi langkah awal bagi UMKM untuk naik kelas. Konsep “naik kelas” mengacu pada peningkatan kapasitas usaha secara menyeluruh, baik dari segi omzet, jumlah tenaga kerja, legalitas, maupun kemampuan digital. Untuk dapat naik kelas, UMKM perlu mencapai sejumlah

indikator, seperti pertumbuhan pendapatan yang stabil, pencatatan keuangan yang tertib, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis. Studi dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM yang berhasil mengakses pembiayaan melalui fintech mengalami peningkatan keuntungan rata-rata sebesar 15%–20% per tahun, terutama karena efisiensi operasional dan ekspansi pasar yang lebih luas.

Dengan adanya akses modal yang lebih inklusif melalui P2P Lending dan dukungan kemudahan transaksi pembayaran dari layanan fintech, UMKM di wilayah Seberang Ulu memiliki peluang besar untuk meningkatkan kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang membaik tercermin dari peningkatan profitabilitas, perputaran arus kas yang sehat, dan kemampuan membiayai operasional secara mandiri. Maka dari itu, mendorong adopsi fintech, terutama layanan P2P Lending, menjadi langkah strategis dalam mengatasi kendala modal dan mendorong UMKM menuju jenjang usaha yang lebih tinggi. Hasil penelitian yang telah terbukti dari (Ariyanti & Marianingsih, 2024) bahwa fintech memungkinkan operasi keuangan yang lebih efisien dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar, sehingga mendorong hasil keuangan yang lebih baik.

Hasil penelitian yang telah terbukti dari Utami & Sitanggang (2021), bahwa peluang *financial technology* bagi kinerja keuangan UMKM adalah melalui kemudahan operasional, efisiensi, transparansi keuangan, serta peningkatan layanan konsumen yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan memanfaatkan sistem pembayaran digital selain untuk kemudahan transaksi pembayaran dengan mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai, meningkatkan transparansi keuangan, dan memungkinkan usaha kecil beroperasi di

pasar lokal dan internasional dengan begitu pelaku usaha berpotensi menarik lebih banyak pelanggan tanpa perlu promosi, terkadang dapat menurunkan biaya operasional dan memberi peluang untuk meningkatkan pendapatan.

Hasil penelitian yang telah terbukti dari Muzdalifa et al. (2018), dan (Raharjo, 2021) yang menunjukkan dampak positif fintech terhadap UMKM, namun belum menganalisis mekanisme spesifik yang menghubungkan adopsi fintech dengan peningkatan kinerja keuangan, khususnya peran kemudahan transaksi pembayaran sebagai variabel *intervening*. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh percepatan transformasi digital akibat pandemi Covid-19 dan inisiatif pemerintah seperti gerakan nasional non-tunai serta *blueprint* sistem pembayaran Indonesia 2025. Maka dari itu penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara komprehensif bagaimana kemudahan transaksi pembayaran dapat memediasi hubungan tersebut, sehingga dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan strategi pemanfaatan fintech untuk meningkatkan kinerja keuangan pada pelaku UMKM.

Di wilayah Seberang Ulu, terdapat berbagai jenis UMKM yang berpotensi mendapatkan manfaat dari adopsi fintech. Wilayah Seberang Ulu memiliki UMKM yang beragam di berbagai sektor usaha. Meskipun adopsi solusi fintech semakin berkembang UMKM Seberang Ulu masih mengalami, beberapa tantangan menghambat integrasi penuh dan dampaknya terhadap pengusaha kecil kesenjangan pengetahuan dan keterampilan menimbulkan hambatan signifikan terhadap adopsi fintech melalui sistem pembayaran digital secara luas. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki teknis yang dibutuhkan untuk menavigasi platform fintech secara efektif (Dangkeng, 2025). Hasil penelitian (Permana et al., 2022)

menunjukkan bahwa kemudahan transaksi pembayaran berpotensi menjadi katalisator dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memperbaiki arus kas UMKM, namun memerlukan ekosistem pendukung yang memadai seperti infrastruktur digital.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Pengaruh *Financial Technology* Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Dengan Kemudahan Transaksi Pembayaran Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus UMKM Seberang Ulu)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *financial technology* terhadap kinerja keuangan pada UMKM di wilayah Seberang Ulu?
2. Bagaimana pengaruh *financial technology* terhadap kemudahan transaksi pembayaran pada UMKM di wilayah Seberang Ulu?
3. Bagaimana pengaruh kemudahan transaksi pembayaran terhadap kinerja keuangan pada UMKM di wilayah Seberang Ulu?
4. Bagaimana kemudahan transaksi pembayaran memediasi pengaruh *financial technology* terhadap kinerja keuangan pada UMKM di wilayah Seberang Ulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *financial technology* terhadap kinerja keuangan pada UMKM di wilayah Seberang Ulu.
2. Untuk menganalisis pengaruh *financial technology* terhadap kemudahan transaksi pembayaran pada UMKM di wilayah Seberang Ulu.
3. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan transaksi pembayaran terhadap kinerja keuangan pada UMKM di wilayah Seberang Ulu.
4. Untuk menganalisis kemudahan transaksi pembayaran memediasi pengaruh *financial technology* terhadap kinerja keuangan pada UMKM di wilayah Seberang Ulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai *financial technology* terhadap kinerja keuangan dengan kemudahan transaksi pembayaran sebagai variabel *intervening* pada sektor UMKM serta dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai hal yang berkaitan dengan teknologi informasi terkait dengan pemanfaatan fintech, kemudahan transaksi pembayaran untuk meningkatkan kinerja keuangan pada sektor UMKM. Sekaligus menambah

pengalaman penulis dalam bidang penelitian dan sebagai bekal untuk menulis penelitian selanjutnya.

2. Bagi Akademis dan Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan sumber referensi dan memberikan kontribusi pengetahuan serta perkembangan khususnya ilmu keuangan mengenai teknologi informasi terkait dengan pemanfaatan *financial technology* pada sektor UMKM dan sebagai bahan rujukan dalam kelengkapan perpustakaan.

3. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan bagi UMKM terutama pada UMKM di kota Palembang dalam mengoptimalkan finansial untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan kemudahan transaksi pembayaran dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan informasi kepada pihak eksternal mengenai laporan keuangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yaitu objek penelitian pada UMKM yang beroperasi di wilayah Seberang Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Dengan subjek penelitian pemilik atau pengelola UMKM yang telah menggunakan layanan *financial technology* dalam operasional bisnisnya. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan *financial technology* sebagai variabel independen, kemudahan transaksi pembayaran sebagai variabel *intervening*, dan kinerja keuangan UMKM sebagai variabel dependen. Jenis *financial technology* yang menjadi fokus penelitian ini adalah layanan yang

berkaitan dengan transaksi pembayaran, seperti dompet elektronik (*e-wallet*), pembayaran digital, dan layanan transfer uang.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam upaya untuk memberikan gambaran yang sistematis dan serarah untuk mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam proposal ini, maka penulisannya diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian, dimana secara umum menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori tentang penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan *financial technology* terhadap kinerja keuangan melalui kemudahan transaksi pembayaran serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan hubungan antar variabel.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang akan menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari objek penelitian, operasional variabel, pengukur variabel dan definisi operasional, populasi, dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini dibahas tentang uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada sebelumnya serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**